



# PENGADILAN TINGGI MEDAN

JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38A,  
TELP : (061) 88360055, FAX : (061) 88360056  
Email: sekretariat@pt-medan.go.id Website: pt-medan.go.id  
**M E D A N ( 2 0 1 3 2 )**

Medan, 8 Mei 2023

Kepada :  
Para Ketua Pengadilan Negeri  
se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan  
di -  
Tempat

## **SURAT EDARAN**

Nomor : W2.U/ 2701 /KP.02.1/5/2023

Tentang

### **LARANGAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN**

Dalam upaya memberantas praktik pungutan liar yang masih marak terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, baik untuk oknum-oknum Aparatur Pemerintah maupun yang mengatasnamakan Aparatur Pemerintah sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 5 Tahun 2016 dan Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dilarang untuk melakukan pungutan apapun yang berkenaan dengan permintaan kelengkapan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI, DPD RI, KPU, Bawaslu, Lurah/Kepala Desa, Bupati/Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur, Presiden / Wakil Presiden dan Organisasi Advokat/Penasihat Hukum, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti biaya materai dan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan lain-lain.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan  
  
Panusunan Harahap  
NIP. 195711051985121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
8. Arsip